

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Setiap orang yang hidup berhak untuk mendapatkannya. Hal ini mengingat pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan akan menjadikan seseorang mempunyai sebuah arah ataupun cita-cita hidup di tengah perkembangan zaman yang senantiasa mengalami perubahan. Pendidikan sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang hayat dan bentuknya berbeda-beda untuk mengembangkan kemampuan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat sesuai dengan kondisi zaman yang ada.¹

Dalam kehidupan bernegara tidak dapat dilepaskan dari aktifitas yang bernama politik. Politik menjadi salah satu hal fundamental yang ada dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang politik dilakukan dengan cara sewenang-wenang dan penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan ketidaktahuan sebagian besar masyarakat tentang politik sebagai obyek politik. Oleh karenanya, setiap warga negara harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang politik. Salah satu cara mendapatkannya adalah dengan pendidikan politik.

Keberadaan pendidikan politik sangat penting demi menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih, jauh dari otoritarianisme dan selalu dalam kontrol rakyat untuk tetap menjaga selalu dalam rel untuk mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat. Hal ini mengingatkan politik mempunyai sebuah cita-cita yang lebih utama ketimbang perebutan pengaruh dan kekuasaan, yaitu mengantarkan rakyat kepada kesejahteraan hidup.

Aktifitas politik yang ada biasanya dilakukan melalui beberapa saluran politik. Saluran politik tersebut di antaranya partai politik, LSM, gerakan dakwah dan *interest group*. Setiap saluran tersebut memiliki tujuan politiknya masing-masing. Untuk mendukung tujuannya, setiap saluran politik memiliki perangkat-perangkat tertentu. Langkah-langkah yang ditempuh juga harus melalui sebuah perencanaan yang matang terlebih dahulu sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah tindakan politik yang efektif dan efisien. Semua itu dapat diperoleh secara maksimal dengan sebuah pembekalan pendidikan politik kepada anggota-anggotanya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran pendidikan politik suatu saluran politik sangat penting. Keberhasilan suatu kelompok dalam mendominasi kelompok yang lain atau mampu mempunyai pengaruh yang lebih kuat dalam masyarakat tidak terlepas dari bagaimana politik yang dimainkan oleh para pelakunya. Dan ini akan berujung pada bagaimana membekali para pelaku tersebut untuk dapat bermain efektif dalam kancah politik yang sebenarnya.

Bagi warga negara yang tidak tergabung dalam saluran politik bukan tidak memerlukan pendidikan politik. Hal ini untuk menghindari rakyat sebagai obyek politik, konsumen politik dan pengikut politik yang hanya patuh tanpa memahami kedudukan, peranan, hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik juga akan berfungsi untuk menyadarkan setiap individu untuk aktif dalam kegiatan politik dan menjadi partisipan yang bertanggung jawab.² Sementara bagi pemimpin, pendidikan politik diperlukan agar dalam tingkah lakunya selalu dipandu oleh moral dan nilai-nilai etnis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³

Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan dakwah, juga tidak lepas dari kegiatan pembelajaran politik yang diberikan kepada para anggotanya. Hal ini tidak terlepas dari tujuannya untuk mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan hidup, seperti yang terkandung dalam makna politik.

Pembelajaran mengenai politik difungsikan untuk dapat memahami tentang konstelasi dalam kehidupan politik. Kehidupan politik dalam suatu negara bukan hanya mengenai aktifitas dari para individu dalam negara tersebut, melainkan sangat luas. Bagaimana praktek penyelenggaraan pemerintahan dilakukan, dukungan dari rakyat dalam kegiatan politik, hingga pengaruh luar yang sarat dengan kepentingan, misal imperialisme dan kolonialisme.

Sebagai sebuah gerakan yang sejak awal menggaungkan perjuangannya pada nilai-nilai Islam, Ikhwanul Muslimin telah mampu memberikan pendidikan politik dengan tidak melepaskan dari nilai dasar yang dianut, nilai Islam. Tidak hanya pada

² Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung

anggotanya, Ikhwanul Muslimin telah mampu melakukan proses pendidikan politik atau *tarbiyah siyasiyah*-nya pada masyarakat Mesir pada umumnya.

Berangkat dari pendidikan politik yang diusung oleh Ikhwanul Muslimin, telah mampu mengubah masyarakat Mesir yang sebelumnya mengalami krisis idealis, tingkat partisipasi politik yang rendah dan sikap yang apatis terhadap kondisi bangsanya sebagai akibat dari sikap represif pemerintah Mesir, yang telah terhegemoni oleh imperialisme Inggris, terhadap rakyatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, coba untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendidikan politik dari Ikhwanul Muslimin, maka kemudian penelitian ini diberi judul: **PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK (*TARBIYAH SIYASIYAH*) IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DI MESIR.**

B. Tujuan Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, mempunyai tujuan untuk memberikan penjelasan tentang:

1. Mengetahui konsep pendidikan politik (*tarbiyah siyasiyah*) dalam gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin terhadap para anggotanya pada khususnya dan masyarakat Mesir pada umumnya.
2. Mengkaji pengaruh pendidikan politik (*tarbiyah siyasiyah*) dari Ikhwanul Muslimin terhadap kehidupan politik di Mesir.
3. Mengetahui strategi dari keberhasilan pendidikan politik (*tarbiyah siyasiyah*) Ikhwanul Muslimin dalam peningkatan partisipasi politik di Mesir

4. Memenuhi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Setelah imperialis Inggris berhasil menguasai Mesir pada tahun 14 September 1882 M, sebuah sistem hukum baru segera diberlakukan sebagai pengganti sistem Islam yang selama tiga belas abad telah menjadi naungan hidup bangsa Mesir. Sebuah sistem hukum baru yang berdasar dari sejumlah undang-undang yang bernama “Undang-Undang Napoleon” dari Perancis.

Adalah Naubar Basya Al-Armani, tokoh yang berada di balik adanya sistem hukum baru yang pada saat itu menjabat sebagai perdana menteri Mesir. Memang bukanlah dari diri Al-Armani sistem baru tersebut ada. Al-Armani memperkerjakan seorang sekretaris berkebangsaan Perancis bernama Al-Ustadz Manuri. Manuri sendiri sebelumnya bekerja sebagai pengacara di Iskandaria. Manuri tidak melakukan tugasnya membuat undang-undang baru secara utuh, melainkan mengambil dari undang-undang Perancis. Undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 1883 M setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari bahasa aslinya, Perancis.⁴

Demikianlah hingga akhirnya undang-undang tersebut berlaku pada bangsa Mesir. Pada saat yang bersamaan, penjajahan datang terhadap masyarakat Arab

⁴ Taufiq Yusuf Al-Wa'iy, *Pemikiran Politik Kontemporer Al Ikhwan Al Muslimun: Studi Analitis*, 2003, hal. 24

secara umum. Mereka membiarkan sistem Islam berlaku dalam urusan-urusan perdata, sedangkan Undang-Undang Napoleon juga diberlakukan dalam urusan yang sama.⁵ Sehingga mereka mengenal dualisme dalam kekuasaan pengadilan, yaitu “pengadilan sipil” dan “pengadilan agama”. Hal ini adalah yang pertama terjadi dalam sejarah panjang masyarakat Arab semenjak penaklukan Arab.

Sistem baru yang ada di Mesir pada saat itu pada akhirnya mengarah kepada sekularisasi, di mana terdapat garis pemisah yang tegas antara urusan agama dengan negara, adanya pemisahan antara kehidupan agama dengan politik, sosial dan kebudayaan. Sehingga wilayah Islam dalam kehidupan masyarakat Mesir mengalami penyempitan dan hanya berkuat pada wilayah ritual peribadatan. Hukum-hukum Islam hanya digunakan pada masalah-masalah yang menyangkut urusan perdata seperti pernikahan, perceraian, nasab, mahar dan nafkah. Sementara untuk urusan pidana digunakan sistem yang baru.

Pendudukan Inggris telah membuat kebebasan yang dimiliki hilang. Inggris melakukan pemberangusan terhadap koran kaum revolusioner nasionalis, melarang masuknya koran *Al-Urwah Al-Wutsqa* ke Mesir dan sebagainya. Untuk mendukung setiap kebijakannya, Inggris mendorong berkembangnya koran-koran yang dianggap loyal yang digunakan sebagai alat untuk merusak opini publik. Kehidupan politik juga dipaksa untuk sesuai dengan ideologi mereka.⁶

⁵ *Ibid*, hal. 35

⁶ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, terj. Salafuddin Abu Sayyid,

Masyarakat Mesir, yang mayoritas beragama Islam, bukan hanya diam melihat keadaan yang sudah sangat melenceng dari sistem Islam ini. Justru sebaliknya, dengan Islam yang selama ini telah menjadi pegangan hidup yang sempurna, membuat mereka telah mengalami sebuah proses penyadaran diri atas realitas kehidupan yang telah terjadi. Munculnya sebuah semangat akan kebebasan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang mereka jumpai selama masa penjajahan berlangsung.

Gerakan-gerakan pembaharuan Islam bermunculan dengan tuntutan diberlakukannya syariat Islam. Dikembalikannya sistem hukum yang telah menjadi pegangan masyarakat Mesir selama lebih dari tiga belas abad. Mereka menginginkan prinsip-prinsip dasar Islam akan kebebasan, keadilan, kejujuran dan terwujudnya keseimbangan sosial dan ekonomi.

Adanya perbedaan masyarakat Mesir dengan masyarakat Eropa pada masa itu, membuat munculnya kekhawatiran kegagalan dari penerapan undang-undang tersebut. Hingga pada akhirnya, penjajah mengatakan bahwa Undang-Undang Napoleon merupakan kehendak dari pemimpin yang konstitusional, sehingga penguasa mempunyai kewenangan yang besar untuk memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan hak-hak individu sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah berubah menjadi represif. Praktek yang demikian ditambah dengan penghalalan hal-hal tertentu yang sebenarnya dilarang dalam syariat Islam telah membuat masyarakat

Masyarakat Mesir yang tidak stabil. Krisis kepercayaan dan krisis idealis

yang melanda masyarakat Mesir menimbulkan adanya sikap apatisme terhadap kondisi bangsanya.

Sikap apatisme masyarakat Mesir akhirnya akan menimbulkan bahaya besar jika sikap pasif, pasrah dan diam tetap dijaga yang akan memunculkan penurunan partisipasi, baik secara kualitas ataupun kuantitas dalam kehidupan politik.⁷ Bahkan hal tersebut juga menimbulkan kekecewaan dan kemarahan yang terpendam pada sebagian masyarakat, yang pada akhirnya nanti akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan menghancurkan pemerintahan yang bersikap represif.

Sebuah lembaga pergerakan dakwah berdiri tahun 1928 di Isma'ilyah, Mesir bernama Ikhwanul Muslimin (Perhimpunan Saudara-Saudara Muslim). Gerakan ini kemudian berpindah ke Kairo pada tahun 1932. Adalah Hasan Al-Banna yang merupakan tokoh di balik berdirinya gerakan ini. Seorang pemuda yang mempunyai semangat menggelora untuk berjuang di medan dakwah. Gerakan ini berorientasi pada perbaikan sosial dengan tanpa meninggalkan identitasnya sebagai gerakan dakwah dengan tradisi wiridnya. Gerakan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, seorang penganut *Syi'ah Babiyah*.

Sebagai sebuah gerakan dakwah, jamaah Ikhwan –demikian Ikhwanul Muslimin lebih dikenal- berangkat dari pemahaman yang baik terhadap Islam. Sehingga apa yang menjadi dasar dari pergerakannya adalah nilai-nilai Islam. Beberapa tokoh dari gerakan ini diantaranya Said Hawwa, Sayyid Quthub, Muhammad Al-Ghazali, Umar Tilimani, Musthofa As-Sibeli, dan lain sebagainya

Meskipun demikian, Ikhwan dianggap telah melakukan penyimpangan dalam kaidah Islam oleh pemahaman As-Salaf As-Shalih.⁸

Adanya kelesuan dalam kehidupan politik sebagai akibat dari imperialisme Barat (Inggris) dan praktek pemerintahan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, telah mendorong gerakan ini untuk melakukan sebuah pembelajaran politik untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sikap kritis terhadap pemerintah pun diharapkan lahir sebagai kontrol terhadap pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Pemerintah yang telah terpengaruh oleh imperialisme Inggris juga tidak luput dari kritik Ikhwan. Melalui pemimpinnya, Al-Banna, Ikhwan mengungkapkan bagaimana suatu pemerintahan yang konstitusional dijalankan.

Dalam pidatonya, Al-Banna mengungkapkan:

Pemerintahan itu haruslah mampu memberikan kemerdekaan (kebebasan) pribadi, syura (musyawarah) juga harus bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, hak-hak rakyat dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat harus ditetapkan dengan tegas, serta adanya ketegasan tentang batas waktu yang jelas bagi dijalankannya suatu pemerintahan⁹

Pernyataan tersebut kemudian ditegaskan lagi dengan: "Soal-soal yang fundamental seperti ini haruslah dijalankan dengan berpedoman kepada ajaran dan

⁸ Pemahaman As Salaf As Shalih adalah cara memahami Islam sebagaimana pemahaman ulama salaf (terdahulu), dalam hal ini para sahabat. Karena mereka yang lebih tahu tentang latar belakang turunnya suatu ayat atau perkataan Rasul.

⁹ Fathi Osman, *IKHWAN dan DEMOCRACY: Ikhwanul Muslimin Membedah Demokrasi dari*

aturan-aturan Islam (Syari'at Islam)¹⁰

Dari pernyataan Al-Banna tersebut telah jelas bahwa Ikhwan menghendaki suatu pemerintahan yang dijalankan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tetap memperhatikan hak-hak yang terdapat pada individu seperti yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Kewajiban pemerintah terhadap rakyat harus dipenuhi. Ikhwan juga menyebutkan harus ada batasan yang jelas tentang lamanya seorang pemimpin atau pemerintah dapat memerintah. Hal ini berarti Ikhwan tidak menghendaki adanya pemerintahan yang berlaku seumur hidup ataupun otoriter.

Dalam penegasan pidato Al-Banna, juga disebutkan tentang digunakannya syari'at Islam untuk menghadapi permasalahan yang fundamental. Bahkan dapat juga diartikan sebagai penggunaan aturan-aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Al-Banna menyebutkan bahwa pemerintahan yang konstitusional adalah sistem pemerintahan yang paling dekat dengan Islam. Dan Ikhwan tidak akan pernah memilih yang lain daripada itu.¹¹

Politik menjadi sorotan utama Ikhwan karena beranggapan bahwa politik merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam, selain karena memang realita kehidupan. Sehingga kemudian pendidikan politik menjadi wajib untuk dilaksanakan. Bahkan untuk tujuan menjadi seorang politikus. Al-Banna

Sesungguhnya seorang muslim tidak sempurna keislamannya kecuali jika ia politisi; pandangannya jauh ke depan terhadap persoalan umatnya, memperhatikan dan menginginkan kebaikannya. Meskipun demikian, dapat juga saya katakan bahwa pernyataan ini tidak dinyatakan oleh Islam. Setiap organisasi Islam hendaknya menyatakan dalam program-programnya bahwa ia memberi perhatian kepada persoalan politik umatnya. Jika tidak demikian, maka ia sendiri yang sesungguhnya butuh untuk memahami makna Islam¹²

Demikian Al-Banna menyebutkan mengapa seseorang perlu mempelajari politik. Sehingga *tarbiyah siyasiyah* yang dimiliki Ikhwan menjadi hal yang harus dipelajari oleh para anggotanya. Pendidikan politik yang dijalankan Ikhwan pun tidak hanya menyentuh para anggotanya saja, melainkan juga membuka mata masyarakat Mesir akan pentingnya hal tersebut untuk menghadapi keadaan di bawah bayang-bayang imperialisme Inggris.

Pendidikan politik dilakukan Ikhwan sebagai bentuk usaha yang dimiliki Ikhwan untuk bagaimana membangkitkan partisipasi politik pada masa itu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan politik yang ada. Adapun masalah-masalah politik yang menonjol pada masa itu adalah pembebasan dari imperialisme, pemerintahan Islam dan kebebasan.¹³ Ketiga hal tersebut yang menjadi prioritas dalam aktifitas politik Ikhwan.

Sebagai sebuah gerakan *tarbiyah*, tentu saja Ikhwan menekankan pada sisi pentingnya pendidikan untuk membangun sebuah bangsa. Hal ini didasari pada kondisi proses pendidikan yang berlangsung di Mesir masa itu. Kondisi dunia pendidikan yang ada sangat terpengaruh oleh penjajahan, pertikaian antar partai dan

¹² Diambil dari *Al-Ma'arif Al-Khwan* (Konferensi) dikutip dari Taufiq Yusuf Al-Waliy, op.cit. hal. 41

dominasi westernisasi.¹⁴ Realita yang demikian merupakan salah satu akibat dari kehidupan politik di bawah bayang-bayang imperialis. Sehingga *tarbiyah siyasiyah* pun menjadi instrumen fundamental Ikhwan. Mengacu pada hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Ikhwan merupakan organisasi yang bersifat edukatif-politis.

Beberapa metode digunakan Ikhwan dalam melakukan pendidikan politiknya. Metode-metode tersebut terangkum dalam perangkat pendidikan yang dimiliki oleh Ikhwan. Adapun perangkat tersebut adalah *katibah, usrah, nizham khash, mu'tamar, daurah tatsqifiyah, mass media dan jawwalah*.¹⁵ Demikian perangkat-perangkat tersebut dijalankan Ikhwan untuk memenuhi tujuan-tujuannya.

D. Pokok Permasalahan

Dari penulisan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan, “Bagaimana pengaruh pendidikan politik (*tarbiyah siyasiyah*) Ikhwanul Muslimin terhadap partisipasi politik di Mesir?”

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori sangat diperlukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Dengan kerangka dasar teori penulis akan menggunakannya sebagai dasar dalam penulisan ilmiah.

Mochtar Mas'ood menyebutkan bahwa teori itu berjud sekumpulan

“”

diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.¹⁶ Sehingga, teori pasti hasil dari gabungan beberapa konsep yang membentuk suatu kesimpulan. Sedangkan konsep sendiri adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu.¹⁷

Dalam penulisan penelitian ini, dalam kerangka dasar teori penulis akan menggunakan beberapa konsep dan teori sebagai acuan dalam penulisan.

1. Pendidikan Politik

Pada hakekatnya, pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Hal ini ditinjau dari tujuannya yang menekankan pada relasi individu dengan individu lain atau dengan masyarakat dalam satu konteks politik, bukan menonjolkan proses kultivasi individu menjadi intelektual politik yang lebih unggul dari yang lain.¹⁸

Beberapa definisi tentang pendidikan politik antara lain:¹⁹

1. Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.
2. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.
3. *R. Hayer* menyebutkan pendidikan politik sebagai usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.

¹⁶
¹⁷
¹⁸
¹⁹

Pendidikan politik seperti pendidikan umumnya, berlangsung secara terus-menerus sehingga seseorang menjadi peka dan kritis terhadap realitas yang ada di sekitarnya. Dari kepekaan dan kekritisannya tersebut, orang diharapkan berfikir dan kemudian menuangkannya dalam sebuah tindakan nyata. Selain itu pendidikan politik diperlukan individu agar dapat memahami posisinya sebagai warga negara yang tergabung dalam ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Karena tidak dapat dipungkiri kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari hubungan dengan individu lain dalam ikatan-ikatan kemasyarakatan.

Bentuk-bentuk pendidikan politik tidak selamanya seperti pendidikan formal pada umumnya, di mana pembelajaran dilakukan dalam bentuk pengajaran yang menggunakan media formal seperti sekolah. Pendidikan politik dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian materi melalui ceramah, dialog, kampanye hingga penyebaran selebaran / *leaflet* maupun pemasangan *pamflet*. Sarana yang digunakan pun tidak terbatas pada lembaga yang formal. Lingkup yang paling dekat dalam hal pembelajaran tentu saja keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Namun pendidikan politik juga memanfaatkan momentum suatu kegiatan sebagai sarannya. Ini bisa ditemui ketika berlangsung pemilihan umum. Berlangsungnya pemilihan umum yang juga merupakan bentuk pendidikan politik, akan disertai dengan aktifitas-aktifitas yang akan menjadi media bagi pembelajaran politik, seperti kampanye, debat, diskusi dan sebagainya.

Materi yang ada dalam pendidikan politik tidak terlepas dari realita politik

1. Selain itu materi akan berkaitan dengan kepentingan masyarakat

perangsang munculnya partisipasi politik pada masyarakat yang terbelakang dan ketidaktahuan politik. Hal ini untuk mendukung proses kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa. Partisipasi politik rakyat akan menjadikan kontrol bagi pemerintah agar kekuasaan yang dimiliki menjadi kekuatan moral yang mampu memerintah dengan adil dan membahagiakan rakyat.²²

2. Partisipasi Politik

Dalam kehidupan politik suatu negara tentu memiliki sebuah sistem politik yang digunakan yang merupakan sistem interaksi masyarakat. Sistem politik memiliki 2 macam struktur, yaitu: supra struktur dan infra struktur. Supra struktur merupakan lembaga yang berwenang membuat keputusan yang otoritatif. Dalam hal ini supra struktur adalah pemerintah, parlemen, lembaga peradilan. Sedangkan infra struktur merupakan institusi, lembaga atau kelompok yang terlibat memberikan masukan atau bahan-bahan terhadap pembuatan keputusan yang otoritatif. Masukan-masukan tersebut yang nantinya akan menjadi input bagi supra struktur sebelum menjadi keputusan / output.

Dalam perjalanannya hingga menghasilkan sebuah keputusan dari supra struktur, aktifitas partisipasi politik menjadi kunci. Hal ini dikarenakan partisipasi politik akan dilakukan seiring dengan munculnya input yang akan diberikan kepada supra struktur. Beragam bentuk dan cara partisipasi politik akan ditampilkan dalam

Dalam kehidupan politik modern, keberadaan partisipasi politik dengan cepat berkembang. Hal ini dapat kita lihat dari ciri khas modernisasi politik, di mana pemerintahan dan politik tidak hanya menjadi urusan satu golongan elit yang kecil saja.²³ Hampir semua golongan dalam masyarakat yang memiliki kesadaran politik akan melakukan partisipasinya dalam politik, baik itu aktif maupun pasif. Myron Weiner menyebutkan lima hal yang menyebabkan meluasnya partisipasi politik dalam dunia modern. Kelima hal tersebut adalah modernisasi, perubahan-perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual komunikasi massa modern, konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik dan keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.²⁴

Beberapa definisi tentang partisipasi politik yang disebutkan antara lain:²⁵

1. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Science*: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
2. Norman H. Nie dan Sydney Verba dalam *Handbook of Political Science*: Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Huntington dan Joan Nelson menyebutkan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan

²³ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, terj. Sahat Simamora, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hal. 1

²⁴ Gabriel A. Almond, *Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik* dalam Mochtar Mas'ood dan Colin McAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001, hal. 45-46

²⁵ Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik: Suatu Pengantar dalam Partisipasi Dan Partai Politik*, Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, PT Gramedia, 1981

keputusan oleh pemerintah.²⁶ Beberapa aspek penting dari definisi tersebut adalah, *pertama*, politik mencakup kegiatan-kegiatan tetapi tidak sikap-sikap. Maksudnya kegiatan tersebut tidak sampai menyentuh tindakan nyata dalam politik, meskipun beberapa pendapat menyatakan itu terkait dengan tindakan politik. Beberapa contoh kegiatan tersebut adalah pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik dan persepsi-persepsi tentang relevansi politik. *Kedua*, kegiatan politik warga negara sebagai individu. Dalam hal ini, kegiatan tersebut mencakup seluruh aktivitas dari individu, baik sebagai warga negara biasa atau pun pejabat pemerintah. *Ketiga*, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.²⁷

Definisi lain menyebutkan sebagai berikut:

partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara dengan bentuk yang terorganisir dalam membuat keputusan-keputusan politik, dengan keikutsertaan yang sukarela dan atas kemauannya sendiri, didasari oleh rasa tanggung jawab terhadap tujuan-tujuan sosial secara umum, dan dalam koridor kebebasan berpikir, bertindak dan kebebasan mengemukakan pendapat²⁸

Seperti telah disebutkan bahwa bagaimana partisipasi politik seseorang sangat dipengaruhi oleh budaya politik yang dianut yang sebelumnya diperoleh melalui pendidikan politik. Implementasi dari budaya politik sebagai hasil dari pendidikan politik tersebut diwujudkan dalam aneka bentuk dan cara partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi yang dikenal, yaitu “konvensional” dan “non-

²⁶ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *op cit.*, hal. 6

²⁷ *Ibid*, hal 6-7

²⁸ Sa'd Ibrahim Jum'ah, *Asy-Syabaab wa Al-Musyarakah As-Siyasiyah*, hal. 32, dikutip dari Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *op cit.*, hal. 98

konvensional". Bentuk yang konvensional adalah partisipasi yang normal dalam demokrasi modern. Sementara non-konvensional termasuk beberapa yang legal maupun ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.²⁹ (Tabel. 1)

Ditinjau dari sisi kuantitas partisipasi politik, maka orang cenderung menjadi partisipan politik yang tidak menyita banyak waktu, seperti memberikan suara dalam pemilu. Hal ini bertolak dengan jumlah orang yang dikategorikan sebagai aktifis yang dengan sengaja waktu melibatkan diri dalam politik yang jumlahnya relatif

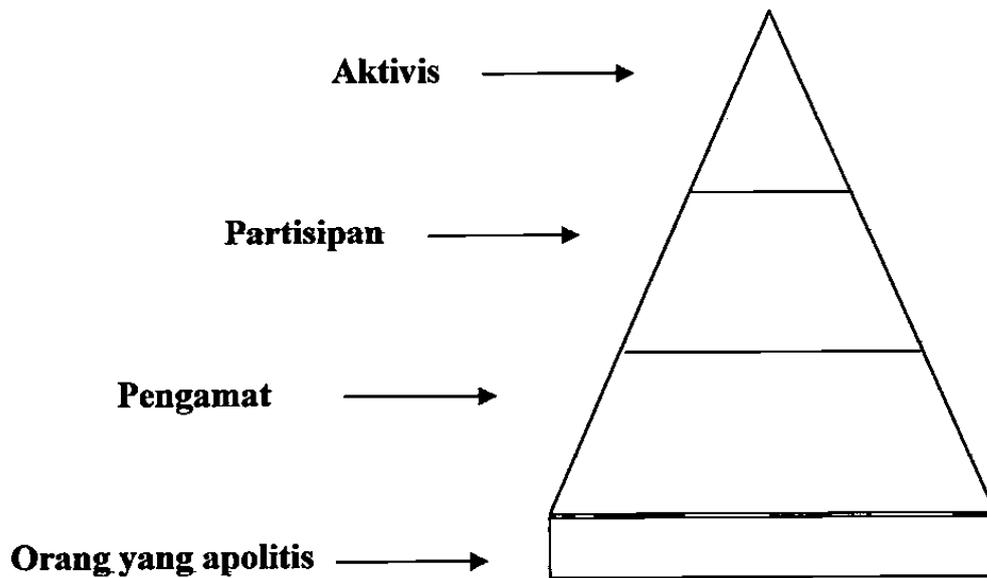
Tabel. 1
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian suara (voting) ▪ Diskusi politik ▪ Kegiatan kampanye ▪ Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan ▪ Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengajuan petisi ▪ Berdemonstrasi ▪ Konfrontasi ▪ Mogok ▪ Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) ▪ Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) ▪ Perang gerilya dan revolusi

Sumber:

Gabriel A. Almond, *Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik* dalam Mochtar Mas' oed dan Colin McAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001, hal. 47

Tabel. 2
Piramida Partisipasi Politik



- Aktivis** : Pejabat partai sepenuh waktu; Pemimpin partai / kelompok kepentingan
- Partisipan** : Petugas kampanye; Anggota aktif partai / kelompok kepentingan; Aktif dalam proyek-proyek sosial.
- Pengamat** : Menghadiri rapat umum; Anggota partai / kelompok kepentingan; Membicarakan masalah politik; Mengikuti perkembangan politik melalui media massa; Memberikan suara dalam pemilu

Sumber:

Berdasarkan David F. Roth dan Frank L. Wilson, *The Comparative Study of Politics*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1976, hal. 159 dikutip dari Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik: Suatu Pengantar dalam Partisipasi Dan Partai Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1981

Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut dapat menunjukkan dengan media apa seseorang melakukan partisipasi politiknya. Sarana yang sering dijumpai adalah partai politik atau organisasi kemasyarakatan (ormas). Dengan menjadi anggota di dalamnya, menjadikan seseorang sebagai golongan aktivis dalam piramida partisipasi politik. Namun tanpa menjadi anggota suatu parpol atau ormas, sebagai seorang individu seseorang dapat melakukan partisipasi politik dalam kapasitasnya sebagai simpatisan dengan memberikan suaranya dalam pemilu atau pun mengikuti kampanye.

Ikhwanul Muslimin lahir di tengah pengaruh imperialisme Inggris dan budaya sekularisme yang sedang tumbuh sebagai akibat imperialisme di Mesir. Ikhwan mencoba melakukan perubahan dan penegakan kembali pemerintahan Islam. Selain itu Ikhwan juga berusaha untuk merealisasikan tujuan politik, sosial dan moral dengan bersandarkan pada Islam. Pendidikan menjadi instrumen yang fundamental bagi Ikhwan. Mereka mengandalkan pendidikan dan reformasi politik sebagai dua jalan pokok dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.³⁰

Ikhwan memahami politik sebagai hal memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal ummat. Persoalan internal diantaranya persoalan pemerintah, mengawasi pemerintah yang berkuasa. Sedangkan persoalan eksternal adalah memelihara kebebasan dan kemerdekaan bangsa, membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain.³¹ Dengan demikian apa yang dilakukan oleh

³⁰ AD/ART Ikhwan, dikutip dari Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *op cit.*, hal. 39

Ikhwan dalam politik adalah menyangkut segi bermasyarakat yang menyangkut hubungan kekuasaan, *power relationship*.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Ikhwan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman Ikhwan terhadap politik. Sehingga yang dilakukannya berkenaan dengan *tarbiyah siyasiyah* pun bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan keyakinan, pengetahuan dan orientasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang tercantum dalam pemahaman politik Ikhwan.³² Keseluruhan dari apa yang coba dibangun Ikhwan melalui pendidikan politiknya menjadi tanggung jawab bersama Ikhwan untuk melepaskan diri dari imperialis.

Pendidikan politik Ikhwan diberikan kepada anggotanya dengan tujuan untuk membentuk individu-individu yang bertanggung jawab dalam politik. Selain itu, terkait dengan sistem politik yang ada di Mesir, pendidikan politik Ikhwan diharapkan mampu menjadi bagian dari input yang mampu memberikan kontribusi yang cukup kepada pemerintah. Dan yang cukup penting adalah keyakinan Ikhwan bahwa cara mencapai pemerintahan yang Islami bukan dengan kekerasan revolusi, akan tetapi dengan tarbiyah dan aktifitas politik.

Pendidikan politik yang dijalankan oleh Ikhwan memiliki 3 tujuan, yaitu kepribadian politik, kesadaran politik dan partisipasi politik.³³ Dari ketiga tujuan tersebut, maka secara teknis partisipasi politik mempunyai peran dalam kehidupan

..... pendidikan politik

tidak hanya menjadi konsumsi elit saja. Sebagai sebuah kelompok, maka partisipasi yang dilakukan Ikhwan adalah individu sebagai anggota organisasi politik. Partisipasi tersebut merupakan upaya untuk menghadapi realitas politik yang ada.

Kesadaran politik juga menjadi perhatian dari pendidikan politik Ikhwan. Karena memang adanya partisipasi politik berawal dari sebuah kesadaran politik yang muncul sebagai respon atas kondisi yang ada. Hal yang memicu kesadaran politik masyarakat terutama adalah keinginan akan kebebasan dari penjajahan Inggris. Meskipun telah memperoleh kemerdekaan berdasarkan proklamasi 28 Februari 1922, namun itu hanya terkesan sebagai formalitas saja. Hal ini disebabkan karena Inggris masih meminta syarat untuk menguasai empat hal secara mutlak, yaitu jaminan untuk dapat mengintervensi masalah internal Mesir, jaminan tentara Inggris tetap berada di Mesir, penguasaan Inggris atas tentara dan polisi Mesir dan penguasaan ekonomi atas Terusan Suez dan Bank Negara.³⁴ Hal lain yang memunculkan kesadaran untuk berpartisipasi politik adalah keinginan terwujudnya pemerintahan Mesir yang Islami.

Sosialisasi politik yang dilakukan Ikhwan terhadap anggotanya telah mampu membuat Ikhwan menjadi salah satu kekuatan politik yang cukup berpengaruh di Mesir. Partisipasi Ikhwan cukup memperlihatkan bahwa Ikhwan telah melakukan pendidikan politik dengan masif kepada anggotanya. Yang paling menonjol adalah partisipasi Ikhwan dalam kapasitasnya sebagai pengamat dengan menghadiri muktamar umum dan memberikan suara dalam pemilu

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka dasar teori pemikiran di atas, dapat diperoleh hipotesa atau jawaban sementara untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

1. Pendidikan politik (tarbiyah siyasiyah) Ikhwanul Muslimin diajarkan bersamaan dengan gerakan dakwahnya dengan menggunakan sistem dakwah yang sistematis serta intensif melalui perangkat-perangkat yang dibentuknya dengan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan pembebasan dari imperialisme dan pembentukan pemerintahan yang Islami.
2. Pendidikan Politik (tarbiyah siyasiyah) Ikhwanul Muslimin telah memunculkan kesadaran politik yang melahirkan semangat untuk melakukan aktifitas politik sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan pemerintahan Mesir yang Islami. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif terhadap partisipasi politik.

G. Jangkauan Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, periodisasi yang digunakan adalah tahun 1932 hingga tahun 1954. Tahun 1932 merupakan masa perkembangan pendidikan dan politik Ikhwan. Sementara tahun 1954 adalah masa di mana dibubarkan secara

H. Metode Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara *Library Research*: memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang disarikan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, buletin, surat kabar serta beberapa informasi yang mendukung penelitian.

I. Sistematika Penulisan

BAB I:

Merupakan pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II:

Membicarakan tentang kondisi dalam negeri Mesir yang meliputi kehidupan sosial dan politiknya. Bab II membahas tentang kondisi masa pendudukan Inggris beserta akibat-akibatnya, kondisi partisipasi politik, masa-masa awal kebangkitan mesir serta profil Ikhwanul Muslimin

BAB III:

Mengupas tentang profil dakwah pendidikan politik Ikhwanul Muslimin yang

..... Ikhwanul Muslimin

BAB IV:

Memaparkan tentang proses serta dampak yang ditimbulkan dari pendidikan politik yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin terhadap kehidupan di Mesir khususnya yang menyangkut partisipasi politik. Bab ini meliputi sikap Ikhwanul Muslimin terhadap kondisi politik Mesir, pandangan-pandangan Ikhwan tentang imperialisme dan demokrasi, implementasi pendidikan politik Ikhwanul Muslimin dan pengaruhnya, partisipasi politik masyarakat dan Ikhwanul Muslimin.

BAB V:

Berisi analisa singkat tentang apa yang menjadi kajian untuk menentukan apakah